

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Sabdo Kurnianto  
 NIP : 196501221990031004  
 Jabatan : Kepala Badan  
 Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
<b>Sasaran Strategis</b>											
1	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana.	1	Indeks Risiko Bencana	e-SAKIP	Definisi: Mengukur Indeks Risiko Bencana berdasarkan probabilitas spacial frekuensi dari bahaya alam X parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan dibagi pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas : 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.  Metode Pengukuran: Indeks Risiko = Bahaya (Hazard) dikali Kertentanan (Vulnerability) dibagi Kapasitas (Capacity)  Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana	N/A	N/A	66,33	N/A	66,33	Nilai
		2	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan	e-SAKIP	Definisi: Mengukur kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan Provinsi DKI Jakarta, dengan menggunakan parameter : SDM (50%), Sarana dan Prasarana (35%) serta Kesiapsiagaan Masyarakat (15%) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.  Metode Pengukuran: (Konsolidasi Lokasi) Bobot BPBD dalam tiap parameter sebesar: SDM 30%, Sarana dan Prasarana 20% serta Kesiapsiagaan Masyarakat 20% 1. SDM: Persentase kecakapan aparatur dalam melaksanakan tugas ((pegawai bersertifikat kebencanaan / jumlah pegawai BPBD x 100%) x Bobot SKPD x Bobot parameter)/10 2. Sarana dan Prasarana: Persentase kesiapan pemanfaatan fungsi peralatan/sarana kerja ((KDO dan perahu layak fungsi / jumlah KDO x 100%) x Bobot SKPD x Bobot parameter)/10 3. Kesiapsiagaan Masyarakat: Persentase layanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana banjir dan peningkatan kapasitas serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana ((jumlah kelurahan terpasang sistem peringatan dini / jumlah kelurahan rawan banjir) x Bobot SKPD x Bobot parameter)/10  Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	N/A	N/A	N/A	2.1	2.1	Nilai

2	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	e-SAKIP	<p>Definisi: Persentase capaian SPM Sub Urusan Bencana yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu: Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Metode Pengukuran: 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana banjir yang memperoleh informasi rawan bencana / Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana banjir x 100% 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana = Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan / Target Jumlah Aparatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana banjir x 100% 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi / Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana banjir x 100% Capaian SPM = Rata-rata capaian dari 3 kegiatan</p> <p>Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	100	100	100	100	100	Persen
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran <math>\geq 80\%</math>. Apabila serapan anggaran di bawah <math>&lt; 80\%</math> maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran <math>\geq 80\%</math> dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <math>&lt; 80\%</math> dan output <math>&lt; 100\%</math> Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran <math>\geq 80\%</math>, namun output <math>&lt; 100\%</math> Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)</p>	N/A	N/A	N/A	91	91%	Persen
4	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor (72)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor (72)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah Nomor (67)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah Nomor (67)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Money KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Money KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase

**Sasaran Khusus**

8	Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi korban bencana	1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi korban bencana	e-Kinerja	<p>Definisi Operasional :</p> <p>Persentase pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi korban bencana meliputi: 1. Air Bersih, 2. Pangan dan Air Minum, 3. Sanitasi, 4. Hunian Sementara, 5. Sandang, 6. Pelayanan Kesehatan, yang mengacu pada Peraturan Kepala BNPB tentang Pemenuhan Kebutuhan Dasar nomor 7 tahun 2008.</p> <p>1. Terpenuhinya kebutuhan Air Bersih : PDAM  2. Terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Air Minum : BPBD dan Dinas Sosial  3. Terpenuhinya kebutuhan Sanitasi : Dinas Lingkungan Hidup  4. Terpenuhinya kebutuhan Hunian Sementara : BPBD dan Dinas Sosial  5. Terpenuhinya kebutuhan Sandang : BPBD dan Dinas Sosial  6. Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kesehatan : Dinas Kesehatan</p> <p>Formulasi pengukuran :  Jumlah pengungsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah pengungsi akibat bencana yang membutuhkan kebutuhan dasar dikali 100%</p> <p>Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	<p>Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))</p>	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<p><b>Formula Pengukuran :</b>  Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order</p> <p><b>Sumber Data :</b>  Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase <b>tersusunnya strategi komunikasi</b> program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.  b) Persentase <b>tersusunnya editorial plan</b> sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi.  c) Persentase <b>tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu &lt;6 jam</b>.  d) Persentase <b>terpublikasikannya materi komunikasi</b> melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan:  a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan.  b) Bobot 20%: PD menyusun materi <i>editorial plan</i> sesuai strategi komunikasi per triwulan.  c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (<i>draft press release</i> dan data pendukung) dalam kurun waktu &lt;6 jam.  d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
12	Terwujudnya tata kelola	1	Predikat SAKIP Perangkat	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA	AA	Predikat

13	Mewujudkan tata kelola	1	Nilai PMPRB Perangkat	e-Kinerja	Defenisi :	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai
14	Peningkatan penggunaan e-	1	Jumlah Surat atau Nota	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase
<b>Sasaran Operasional</b>											
16	Terselesainya Tindak Lanjut	1	Persentase capaian	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
17	Meningkatnya penyelesaian	1	Persentase capaian	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
18	Meningkatnya penyelesaian	1	Persentase progress	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, Januari 2022  
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

Sabdo Kurnianto  
NIP 196501221990031004